

Manajemen Keuangan Sekolah dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan di Bekasi

Adriana Hanny Bella Sukma¹, Alifia Maharani Nasution²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Adrianahanny1234@gmail.com¹, lfyalifia@gmail.com²

Abstract: *This study aims to analyze the financial management of schools in the fulfillment of educational facilities at SDN Wanasari 01, Cibitung, Bekasi. This research uses a qualitative case study approach. The data collection technique is done by using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique uses data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Checking the validity of the data is done through; credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results showed that school financial management in fulfilling educational facilities at SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi was carried out through school budget planning, school financial accounting, and school financial accountability.*

Keywords: *Management, Finance, School, Infrastructure*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SDN Wanasari 01, Cibitung, Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Pengecekan keabsahan datanya dilakukan melalui; credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen keuangan sekolah dalam pemenuhan sarana prasarana pendidikan di SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi dilakukan melalui perencanaan anggaran (budgeting) sekolah, pembukuan (accounting) keuangan sekolah, pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah.*

Kata Kunci: *Manajemen, Keuangan, Sekolah, Infrastruktur*

Pendahuluan

Berdasarkan PP No 48 Tahun 2008, biaya pendidikan dibagi menjadi tiga jenis: biaya pendidikan, biaya organisasi dan administrasi pendidikan, dan biaya pribadi siswa. Aspek pembelanjaan terdiri dari pengalokasian biaya pelatihan untuk setiap komponen yang akan dibiayai. Sebagian dari seluruh pendapatan retribusi digunakan untuk membiayai kegiatan administrasi, administrasi, pendidikan dan infrastruktur. Aliran pendapatan terdiri dari berbagai jenis sumber yang perlu dikelola berdasarkan tipe data yang disinkronkan menggunakan item anggaran yang telah direncanakan

sebelumnya. Tanpa perencanaan, bukan saja tidak mungkin mengalokasikan dana untuk kebutuhan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, tetapi juga menyebabkan penggunaan dana sekolah yang tidak tepat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena pengelolaan keuangan berkaitan langsung dengan korelasinya dengan kegiatan sekolah, maka perlu dipastikan pengelolaan keuangan dapat diterapkan secara profesional dan stabil.

Salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan pendidikan, terletak pada kemampuan SDM dalam mengelola dana yang tersedia dengan mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pembangunan pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program. Pemerintah dalam hal ini memegang peranan yang esensial demi terciptanya situasi dan kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2003) bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Kata diskriminatif di sini berlaku untuk pembiayaan pendidikan, artinya bahwa pembiayaan pendidikan haruslah tidak mendiskriminatifkan setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengikuti pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi dirinya.¹

Pengelolaan keuangan suatu lembaga pendidikan harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan teliti. Penerapan manajemen keuangan di lembaga pendidikan bisa dilihat dari kemampuan lembaga tersebut dalam melaksanakan tahapan-tahapan dalam mengatur keuangan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada pemerintahan dan masyarakat. Tepatnya kerjasama yang tulus seorang kepala sekolah dan manajer keuangan dalam manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting untuk memanfaatkan dan mencari segala macam sumber dana agar terhindar dari kekurangan dana. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawabannya tidak hanya dihadapkan pada hubungan dengan manusia saja, akan tetapi juga dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. Oleh karena itu, sebelum dan selama mengelola lembaga pendidikan sebaiknya manajemen qalbu para stakeholder lembaga pendidikan Islam harus senantiasa dikondisikan terlebih dahulu. Dengan

¹ Renny Mayasari, Shopiana, and Toni Julham, “Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan,” *Sabilarrasyad* 3, no. 2 (2018): 77–90, <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/482>.

adanya sistem manajemen yang bernafaskan al-Qur'an dan hadis diharapkan mencetak lembaga pendidikan yang berkualitas.²

Pengelolaan keuangan sekolah dilaksanakan dengan sangat baik, namun tingkat penegakannya tidak konsisten di seluruh sekolah. Berbagai konflik dalam pengelolaan keuangan sekolah bergantung pada kondisi fisik sekolah, letak geografis sekolah, dan citra sekolah. Sekolah dengan tuntutan masyarakat yang tinggi dalam hal pengelolaan keuangan jauh dari kurang diminati masyarakat karena harus melakukan kegiatan kompleks yang semakin menuntut dari masyarakat.

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam manajemen keuangan sekolah, yaitu prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik diperlukan dalam pengelolaan dana pendidikan. Sekolah mempunyai pengaturan terkait penyerapan anggaran sekolah yang digunakan dalam menjalankan roda pendidikan di sekolah, baik sekolah yang berstatus negeri maupun swasta. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa operasional kegiatan sekolah perlu adanya manajemen keuangan dalam mengatur tata kelola penggajian pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga tata usaha, memperbaiki/meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Untuk membantu dalam masalah pembayaran operasional sekolah, pemerintah memberikan dana yang disebut dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Subkhi Widyatmoko, 2017). BOS diberikan bagi satuan pendidikan di lembaga sekolah/madrasah untuk membantu pembiayaan peserta didik agar mampu menunjang sarana prasarana pendidikan, pemeliharaan dan perbaikan sekolah, biaya ulangan umum harian, biaya honor guru.³

Sarana prasarana perlu dikelola dengan baik agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Oleh karena itu, sekolah membutuhkan sistem manajemen sarana prasarana yang baik. Tanggung jawab mengelola sarana prasarana terletak pada kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana, serta orang-orang yang ditunjuk untuk mengelola sarana prasarana sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana harus memiliki kemampuan mengelola sarana prasarana. Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan formal membutuhkan dukungan sarana prasarana, agar kebutuhan sarana prasarana dapat terpenuhi. Dengan sarana

² Iffatun Najihah and Suaib H. Muhammad, "Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis," *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (December 3, 2021): 223–39, <https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V5I2.21616>.

³ Rita Pusvitasari and Mukhamad Sukur, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)," *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 94–106, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/959/pdf>.

prasarana yang memadai, kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung siswa untuk dapat berprestasi. Terdapat beberapa faktor pendukung siswa untuk dapat berprestasi, diantaranya adanya sarana prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, motivasi dari diri siswa serta motivasi dari orang tua dan lingkungan sekitar. Salah satu pendukung prestasi siswa adalah ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan semangat siswa dalam mengembangkan keterampilan siswa.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis (metode) yang digunakan untuk mempelajari atau mempelajari subjek di lingkungan alamnya, tanpa manipulasi dengan menggunakan metode alami, dan tanpa menguji hipotesis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti akan mendeskripsikan secara sistematis materi pembahasan dari berbagai sumber dan menganalisisnya secara mendetail untuk menarik kesimpulan dari kajian manajemen keuangan sekolah pada pembangunan dan prasarana sekolah di SDN Wanasari 01, Cibitung, Bekasi.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, sekretaris, dan bendahara serta beberapa guru. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan menggunakan interview, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. Pengecekan keabsahan datanya dilakukan melalui; credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai pengelolaan keuangan sekolah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan di SDN Wanasari 01 Cibitung Bekasi adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Manajemen Keuangan Sekolah

Pengelolaan keuangan sekolah secara umum mengacu pada kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Kegiatan ini meliputi perencanaan peraturan, organisasi, akuntansi, penawaran atau penetapan biaya, pemantauan dan akuntansi. tugas. Lembaga pendidikan harus mengelola keuangannya agar dapat menggunakan dana siswa secara efisien, memastikan penggunaan dana siswa, dan meminimalkan kesalahan dalam aturan penggunaan. Pengelolaan

⁴ Safinatun Munawaroh and Rz. Ricky Satria Wiranata, "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret," *ÁL-FÂHIM | Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 85–98.

keuangan sekolah membutuhkan pengetahuan dan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat berfungsi dengan baik. berguna. Pemimpin adalah figur sentral dalam hal ini. Direksi harus memahami sepenuhnya pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Karyanya juga penting untuk implementasi strategi pengelolaan keuangan sekolah.

Manajemen keuangan adalah hal yang sangat penting dilakukan di sekolah sehingga kegiatan pendidikan di sekolah menjadi teratur. Manajemen keuangan diterapkan melalui beberapa tahap antara lain: merencanakan (planning), mengorganisasikan (organizing), melaksanakan (actuating), mengawasi dan mengendalikan (controlling). Dalam pemisahan tugas dan fungsi, administrasi keuangan dibagi menjadi 3 fungsi, antara lain: fungsi otorisator, fungsi ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah orang yang berwenang dalam menentukan kebijakan terkait dengan kegiatan mengeluarkan dan menerima uang. Ordonator adalah kepala sekolah berhak memerintahkan pembayaran atas semua aktifitas yang dilakukan berdasarkan otorisasi yang ditentukan. Bendaharawan adalah orang yang berwenang dalam menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang atau berkas-berkas berharga lainnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap administrasi pendidikan di sekolah. Administrasi keuangan diatur oleh seorang bendaharawan dengan cara membuat pembukuan berdasarkan aturan yang berlaku.⁵

Menurut Indra Bastian (2015) manajemen keuangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai: Pertama, seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, seni dan ilmu mengelola sumber daya keuangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ketiga, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.⁶

⁵ Najihah And Muhammad, "Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis."

⁶ Silvia Nora, Almasdi Syahza, And Zulfan Saam, "Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau,"

B. Urgensi Manajemen Keuangan Sekolah dalam Perspektif Islam

Keuangan lembaga pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menunjang sumber daya penyelenggara pendidikan dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Hal tersebut dapat mengarahkan pada efektivitas pengelolaan pendidikan agar terlaksana sesuai harapan. Terlaksananya pendidikan yang sesuai dengan tujuan, harus didukung dengan kemaksimalan manajemen pendidikan pada umumnya dan khususnya dalam manajemen keuangannya. Manajemen keuangan yang maksimal akan tercapai ketika dilakukan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab kemudian dilaporkan dengan jujur dalam bentuk pembukuan maupun pertanggungjawaban.⁷ Allah SWT berfirman dalam QS al-Baqarah: 197 yang artinya (Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barangsiapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Kegiatan pengelolaan keuangan memungkinkan untuk merencanakan, mengamankan, dan mencatat dana yang dibutuhkan untuk kegiatan sekolah secara transparan dan menggunakannya untuk menjalankan program sekolah secara efisien dan efisien. Oleh karena itu, tujuan pengelolaan keuangan adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan sekolah. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah sehingga mengharuskan untuk menunjukkan kreativitas dalam meninjau sumber dana dan menunjuk bendahara untuk mengawasi akuntansi dan pelaporan keuangan, dan menggunakannya dengan tepat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

C. Perencanaan Anggaran (Budgeting) Sekolah

Perencanaan Anggaran (Budgeting) SDN 01 Wanasari merupakan gambaran tentang kinerja akademik yang diharapkan akan dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk keuangan. Rencana tersebut disusun secara sistematis, mencakup semua kegiatan sekolah yang tercantum dalam satuan

Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif 1, No. 2 (2017): 96-106, <https://jmpk.ejournal.unri.ac.id/index.php/jmpk/article/viewfile/5021/4714>.

⁷ Najihah And Muhammad, "Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis."

keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Proses penganggaran membutuhkan data yang akurat dan lengkap, sehingga pada saat penganggaran, dan dapat mengantisipasi segala kebutuhan perencanaan untuk masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Mukhamad bahwa perencanaan anggaran (budgeting) merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Perencanaannya disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan di sekolah, yang dinyatakan dalam satuan keuangan, dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang.⁸

Tri dan Badrus menambahkan dalam penelitiannya bahwa melakukan proses perencanaan yang dilakukan pada tahun ajaran baru dan melibatkan wali murid dan komite sekolah. Sebelum RAKAS dibuat, dari pihak sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada wali murid agar hadir dalam proses pembuatan RAKAS. Perencanaan sebagai suatu proses Pencapaian tujuan seefektik dan seefisien mungkin. Dibawah pimpinan kepala sekolah melakukan proses perencanaan dengan memperhatikan berbagai hal melalui data dan informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak. Pihak yang paling berpengaruh adalah wali murid, masyarakat agar visi yang diemban sekolah dapat terwujud. Data tersebut akan dikaji dan pada akhirnya akan disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan RAKAS.⁹ Hal ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Safinatun dan Rz. Ricky yang mengemukakan bahwa proses pengadaan sarana prasarana mengacu pada RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang telah dibuat oleh kepala sekolah bersama wakil kepala sekolah. Berdasarkan RKAS tersebut, selanjutnya sekolah melakukan pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan atas persetujuan dari kepala sekolah. Pengadaan sarana prasarana di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret dilaksanakan oleh wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana

⁸ Pusvitasari and Sukur, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)."

⁹ Tri Erlinawati and Badrus, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Di SMAN1 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 8, no. 3 (2018): 413-28, <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/view/733/515>.

pada awal tahun ajaran baru. Dana yang digunakan untuk pengadaan sarana prasarana berasal dari dana sekolah.¹⁰

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan Latifah. et.al., mengungkapkan bahwa faktor pendukung manajemen keuangan dalam pengadaan sarana dan prasarana, diantaranya: Pertama, kondisi sekolah yang kondusif dalam melakukan proses pembelajaran, serta tersedianya tenaga pendidik yang kompeten dan profesional. Kedua, penerimaan peserta didik sudah baik melalui kriteria tes masuk sekolah dan Kegiatan ekstrakurikuler berjalan dengan baik. Ketiga, terciptanya kerjasama antara sekolah dengan warga sekolah (waka kurikulum, staf TU, guru, komite sekolah, dan orang tua siswa) berjalan dengan baik serta terciptanya hubungan sekolah dengan masyarakat (orangtua siswa) melalui komite sekolah terjalin harmonis dalam usaha memajukan program sekolah. Sementara faktor penghambat penerapan manajemen sarana dan prasarana antara lain minimnya dana serta belum terpenuhinya sarana prasarana atau perlengkapan yang dimiliki sekolah.¹¹

Blocher dalam Anwar (2013: 215) mengemukakan bahwa proses penganggaran dapat melibatkan tugas-tugas informal dan sederhana di lembaga-lembaga kecil yang hanya membutuhkan waktu beberapa hari untuk digunakan di perusahaan atau lembaga besar seperti pemerintah, yang merupakan proses yang sangat kompleks dan panjang. Ini bisa memakan waktu beberapa bulan, bahkan satu tahun atau lebih. Proses anggaran biasanya meliputi: (a) Panitia Anggaran, yang mengawasi keseluruhan anggaran, terdiri dari unsur pengatur Forum, yang merupakan badan tertinggi organisasi dalam semua hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran. (b) menetapkan jangka waktu anggaran yang memiliki jangka waktu satu tahun dan sesuai dengan tahun anggaran perusahaan; (c) Spesifikasi pedoman anggaran, yaitu pemilihan pedoman anggaran dan arahan aturan, yang menjadi tanggung jawab Panitia Anggaran. (d) penyusunan usulan anggaran berdasarkan rekomendasi anggaran yang berkaitan dengan penggunaan faktor eksternal dan internal lembaga (e) negosiasi anggaran ini dilakukan antara masing-masing unit dengan pimpinannya; Ketika perubahan dilakukan pada proposal anggaran, negosiasi dilakukan di semua tingkat organisasi dan anggaran biasanya memakan waktu paling

¹⁰ Munawaroh and Wiranata, "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret."

¹¹ Latifah, Eri Purwanti, and Nurhadi Kusuma, "Peran Manajemen Keuangan Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Mts Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Banyumas," *Al Idarah* 2, no. 1 (2017): 9-14.

lama. (f) Manajemen mengajukan persetujuan anggaran secara penuh dan menyerahkan anggaran kepada: Direksi atau Pejabat Pemerintah Daerah (g) Perubahan anggaran hanya dilaksanakan dalam keadaan khusus, dan persetujuan perubahan anggaran, meskipun terjadi, relatif sulit untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan tidak semua peristiwa dapat diestimasi dari anggaran. Prosedur ini biasanya dilakukan di organisasi besar seperti instansi pemerintah dan di sekolah-sekolah yang biasanya lebih sederhana dan tidak terlalu rumit.

D. Pembukuan (Accounting) Keuangan Sekolah

Akuntansi keuangan SD Negeri Wanasari 01 merupakan proses registrasi yang dilakukan secara berkala untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Meliputi catatan arus keuangan yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada lembaga pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Akuntansi keuangan SD Negeri Wanasari 01 berjalan dengan baik dalam arti CFO menjalankan fungsi dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ada, dimulai dari penerimaan calon. Akuntansi keuangan terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, mulai dari penyediaan sekolah orang tua hingga penyediaan keuangan hingga pelaporan keuangan.

Daftar semua aset yang diperoleh untuk mengajar dicatat dan disimpan dengan rapi di buku kas sekolah. Demikian pula dalam akuisisi struktur pendukung lainnya, Bendahara telah menghasilkan laporan yang sangat akurat dan telah disetujui oleh Direksi, sehingga akuntabilitas menjadi referensi untuk bekerja sama dengan Yayasan untuk melakukan penilaian keuangan secara berkala. dan panitia pendiri. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rita dan Mukhamad bahwa pembukuan keuangan merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur oleh bendahara untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi pencatatan terhadap alur keuangan yang ada, khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan pembukuan keuangan yang dilakukan dengan baik, artinya penanggung jawab keuangan telah melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur yang ada, mulai dari menerima pengajuan, pemberian disposisi oleh kepala sekolah, pencairan keuangan, sampai pada pelaporan keuangan. Begitu juga dengan pembukuan keuangan yang berhubungan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan.¹²

¹² Pusvitasari and Sukur, "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)."

Infrastruktur pendidikan sangat penting sebagai sarana penunjang hasil belajar siswa. Lembaga menerapkan struktur menggunakan dana sekolah, dan setiap pembelian harus dikonfirmasi dalam bentuk nota dan nota. Ini berkembang menjadi sebuah lembaga untuk merencanakan akuisisi dan pemeliharaan aset dalam menanggapi kebutuhan masa depan dengan menyediakan infrastruktur administrasi dan keuangan yang efisien, memfasilitasi pemeliharaan dan pemantauan, dan menyediakan data dan informasi. Akuntansi keuangan sekolah memfasilitasi manajemen melalui pelaporan infrastruktur pendidikan dan pelacakan perlengkapan sekolah, memfasilitasi kebutuhan seperti pelaporan infrastruktur pendidikan.

Pembukuan anggaran, baik penerimaan maupun pengeluaran harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar. Hal ini dilakukan supaya dapat membuat suatu laporan keuangan dan penggunaannya yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Silvia., et. al., menyimpulkan bahwa proses pelaporan pembiayaan pendidikan di jenjang pendidikan dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau terbagi 2 yaitu untuk dana yang bersumber dari dana BOS dan untuk dana yang bersumber dari Yayasan dan IKS. Untuk laporan penggunaan dana BOS dilaporkan kepada pemerintah sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang ada. Untuk proses pelaporan penggunaan dana dari YPCR dan IKS adalah unit melaporkan penggunaan dana untuk operasional dalam form U-102 yang dilengkapi dengan dokumen berupa faktur, kwitansi, materai, tanda terima absensi untuk UHD, surat tugas, copy-an U-101 yang telah disetujui. Jika terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan U-105/U-101, harus dibuatkan justifikasinya oleh kepala unit dan harus diketahui atau mendapat persetujuan dari Direktur Umum. Jika terjadi overrun (max 10 %) dari U-101, unit membuatkan justifikasinya.¹³

E. Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Keuangan Sekolah

Tanggung Jawab Keuangan SDN Wanasari 01 mengacu pada tanggung jawab individu atas segala tindakannya, terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan oleh mereka yang telah memberikan wewenang kepadanya. Sesuai dengan rencana tertulis sekolah, kepala sekolah menggunakan dana secara bertanggung jawab untuk membangun gedung dan infrastruktur sekolah seperti yang dilaporkan kepada kepala sekolah, yayasan, orang tua,

¹³ Nora, Syahza, and Saam, "Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau."

masyarakat, dan pemerintah. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dalam penyelenggaraan prasarana pendidikan tertuang dalam buku kas harian dan buku pengelolaan keuangan yang ditetapkan oleh bendahara sekolah (periode bulanan, Triwulanan dan akhir tahun).

Lebih lanjut, laporan pertanggungjawaban di SDN 01 Wanasari dilakukan pada akhir tahun pelajaran dengan menggunakan wali murid. Dan pada akhir tahun pelajaran, RAPBS dirundingkan untuk prasarana pendidikan menggunakan yayasan, dewan sekolah, dan pihak penanggung jawab kepatuhan sekolah menggunakan aturan perencanaan. Pengamatan lapangan oleh peneliti telah menunjukkan bahwa SDN Wanasari 01 telah memenuhi tanggung jawab keuangan sekolah dalam skala mini menggunakan metode penerusan klaim keuangan kepada kepala sekolah.

Meskipun sangat bertanggung jawab, laporan keuangan disimpan pada akhir setiap tahun di sekolah yang aman dengan wali siswa. Tanggung jawab ini juga merupakan bagian dari pengawasan yang dapat Anda lakukan sesuai dengan kebutuhan dan wewenang Anda. Dimulai dengan penanganan biaya, pengaturan ongkos kirim, perhitungan dan penolakan masuk oleh contact person yang ditunjuk. Secara berkala perlu adanya pertanggungjawaban atas laporan tahunan dan tindak lanjut kepada pemangku kepentingan. Tanggung jawab penerimaan dan penggunaan dana Forum Pendidikan dilakukan dalam bentuk laporan bulanan dan triwulanan, khususnya untuk tujuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten.¹⁴

Laporan keuangan sekolah didasarkan pada pembiayaan keseluruhan kegiatan sekolah. Laporan disiapkan oleh keuangan dan fakultas. Laporan keuangan mencakup pendapatan, pengeluaran dan pengeluaran untuk digunakan. Pertanggungjawaban keuangan sekolah dipertanggungjawabkan kepada kementerian pendidikan nasional dalam bentuk dokumen laporan yang dibuat oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah. Setelah dilaporkan maka tindak lanjut dari pertanggungjawab tersebut yaitu revisi laporan dengan cara menindaklanjuti kegiatan yang belum terlaksana. Bentuk transparansi dapat dilihat pada evaluasi oleh kepala sekolah dan monitoring oleh pihak yayasan.¹⁵

¹⁴ Komariah, N. (2018). *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jurnal AI-Afkar, 6(1), 67-93

¹⁵ Jamaluddin Iskandar, "Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan," *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (June 30, 2019): 114-23, <https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V3I1.8133>.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berarti penggunaan uang kuliah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sekolah menggunakan uang secara bertanggung jawab sesuai dengan rencana dan aturan yang telah direncanakan sebelumnya. Tanggung jawab ada pada orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Prasyarat untuk membangun akuntabilitas ada tiga pilar utama diantaranya: (1) Transparansi administrasi sekolah melalui partisipasi dalam berbagai komponen pendidikan, (2) Setiap lembaga memiliki standar kinerja yang dapat diukur dengan kinerja tanggung jawab, fungsi dan kewenangannya dan (3) Partisipasi pelayanan yang baik untuk memberikan pelayanan yang sempurna dan menciptakan suasana yang aman. dengan cepat.

Silvia Nora., et.al menjelaskan dalam penelitiannya bahwa langkah-langkah yang diambil meliputi: (1) Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan pencapaian tujuan baik di tingkat sekolah maupun ditingkat yayasan, (2) Menentukan skala prioritas, (3) Menekan anggaran dan belanja yang tidak penting, (4) Melakukan revisi budget, (5) Memangkas program yang tidak terkait langsung kepada pembelajaran, (6) Melakukan supervisi atau pengawasan terhadap kegiatan, (7) Melakukan apa yang dibutuhkan bukan yang diinginkan, (8) Melihat, mempelajari cash flow tahun sebelumnya, rencana program yang sedang berjalan, dan menganalisis kebutuhan, dan (9) Mempromosikan sekolah keluar supaya murid bertambah dalam rangka menaikkan pemasukan atau pendapatan.¹⁶

Kesimpulan

Pengelolaan keuangan sekolah dasar harus dimiliki oleh sekolah agar pemasukan dan pengeluaran uang sekolah dapat berfungsi dengan baik dan sarana prasarana pendidikan dapat terwujud. Tujuannya dapat mendukung proses belajar mengajar untuk memastikan tercapainya tujuan pendidikan secara akurat dan optimal. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah dalam pengelolaan keuangan melalui perencanaan anggaran (budgeting) sekolah, pembukuan (accounting) keuangan sekolah, pertanggungjawaban (akuntabilitas) keuangan sekolah. Adapun prinsip yang harus dijadikan pijakan oleh sekolah dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan harus didasarkan pada manajemen terbuka, agar dapat melakukan tugas yang dibebankan untuk pengembangan lembaga dan infrastruktur pendidikan, serta mempertimbangkan pentingnya memelihara sarana dan prasarana yang ada dan yang akan datang.

¹⁶ Nora, Syahza, and Saam, "Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau."

Bibliography

Erlinawati, Tri, and Badrus. "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam di SMAN 1 Papar Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018." *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 8, no. 3 (2018): 413–28. <https://ejournal.iaitribakti.ac.id/index.php/intelektual/article/view/733/515>.

Huriyah, Lilik. *Manajemen Keuangan: Optimalisasi Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Islam*. Surabaya: UINSA. 2014.

Iskandar, Jamaluddin. "Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 3, no. 1 (June 30, 2019): 114–23. <https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V3I1.8133>.

Komariah, N. (2018). *Konsep Manajemen Keuangan Pendidikan*. Jurnal Al-Afkar, 6(1), 67–93.

Latifah, Eri Purwanti, and Nurhadi Kusuma. "Peran Manajemen Keuangan Dalam Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Mts Negeri 2 Pringsewu Kecamatan Banyumas." *Al Idarah* 2, no. 1 (2017): 9–14.

Mayasari, Renny, Shopiana, and Toni Julham. "MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN." *Sabilarrasyad* 3, no. 2 (2018): 77–90. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/sabilarrasyad/article/view/482>.

Munawaroh, Safinatun, and Rz. Ricky Satria Wiranata. "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Non Akademik Siswa Melalui Manajemen Sarana Prasarana Di SMP Muhammadiyah Boarding School Pleret." *ÁL-FÂHIM | Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2020): 85–98.

Najihah, Iffatun, and Suaib H. Muhammad. "Konsep Manajemen Keuangan Dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Al Qur'an Dan Hadis." *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan* 5, no. 2 (December 3, 2021): 223–39. <https://doi.org/10.24252/IDAARAH.V5I2.21616>.

Nora, Silvia, Almasdi Syahza, and Zulfan Saam. "Pelaksanaan Manajemen Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Efektivitas Penggunaan Anggaran Di Jenjang Pendidikan Dasar Yayasan Pendidikan Cendana Riau." *Jurnal Manajemen Pendidikan Penelitian Kualitatif* 1, no. 2 (2017): 96–106. <https://jmpkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JMPPK/article/viewFile/5021/4714>.

Pusvitasari, Rita, and Mukhamad Sukur. "Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Pemenuhan Sarana Prasarana Pendidikan (Studi Kasus Di Sd Muhammadiyah 1 Krian, Sidoarjo)." *Al-Tanzim : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2020): 94–106. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/959/pdf>.

Sanisah, Siti. *Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Vol., 3(1). 2015).